



**PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA SECARA RETROAKTIF
SEBAGAI PENYEIMBANG
ASAS LEGALITAS DAN ASAS KEADILAN
(SUATU PERGESERAN PARADIGMA DALAM ILMU
HUKUM PIDANA)**

PIDATO PENGUKUHAN

**DIUCAPKAN PADA UPACARA PENERIMAAN
JABATAN GURU BESAR DALAM ILMU HUKUM PIDANA
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG, 7 AGUSTUS 2004**

**Oleh :
NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA**

ABSTRAK

Pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" merupakan pengecualian dari asas legalitas atau "principle of legality" atas dasar "extra ordinary crimes" seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat. Asas legalitas pada intinya berisi asas "lex temporis delicti" hanya memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana dan kurang memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat.

Asas legalitas merupakan asas fundamental bagi negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak mutlak dalam arti pembentuk undang-undang dapat menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi sebagai tindak pidana dan dapat dipidana asalkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang dalam hukum pidana internasional disebut "prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa".

Pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana, merupakan penyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada "kepastian hukum" dan asas "keadilan untuk semuanya".

Pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" dengan kondisi-konsisi tertentu, seperti kepentingan kolektif baik kepentingan masyarakat, bangsa, maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan

dari asas legalitas dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat.

Kata kunci : pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif, asas legalitas, dan asas keadilan.



Yang saya hormati

Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro

Sekretaris Senat Universitas Diponegoro

Seluruh Anggota Dewan Penyantun Universitas

Diponegoro

Para Guru Besar di Lingkungan Universitas

Diponegoro

Para Guru Besar dari luar Lingkungan Universitas

Diponegoro

Seluruh Anggota Senat Universitas Diponegoro

Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro

Para Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga di

Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas

Diponegoro

Saudara-saudara Mahasiswa, khususnya yang

menjabat di Lembaga-lembaga Kemahasiswaan

Seluruh hadirin serta tamu undangan.

Assalamu'alaikum Warakmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastyastu.

Perkenankan saya pertama-tama mengucapkan puji syukur ke-hadirat Hyang Widhi Waca (Tuhan Yang Maha Esa), atas karunia dan kemurahan-Nya yang dilimpahkan kepada saya dan keluarga serta seluruh hadirin yang saya muliakan, karena pada pagi ini dapat berkumpul

dalam keadaan sehat wal'afiat. Juga puji syukur kami ucapkan kepada-Nya atas rahmat yang diherikan khususnya kepada saya, dimana pada kesempatan ini dapat berdiri di mimbar yang mulia ini di depan sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro yang merupakan lembaga akademik tertinggi dan berwibawa, untuk melaksanakan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro yang telah berkenan menyelenggarakan rapat senat terbuka ini dengan mengundang berbagai pihak untuk memberi kesempatan kepada saya melaksanakan pidato pengukuhan pada hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta tamu undangan yang telah berkenan untuk menghadiri pidato pengukuhan ini. Hadirin yang saya hormati.

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, saya akan mencoba untuk mengemukakan satu permasalahan dalam hukum pidana material yang menurut saya merupakan permasalahan yang sangat fundamental ialah pemberlakuan hukum

pidana secara "retroaktif". Pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" yang menurut hemat saya masih dalam ranah hukum pidana material (*substantive criminal law*). Sampai saat ini, di kalangan akademisi permasalahan pemberlakuan "retroaktif" kurang mendapat perhatian seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam pembahasan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, sehingga tidak boleh disimpangi. Artinya asas legalitas dalam hukum pidana tidak membenarkan adanya pernyataan berlaku surut atau "retroaktif" suatu perundangan pidana.

Yang mendorong saya untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif", di samping fenomena legislatif akhir-akhir ini, juga sebagai pertanggungjawaban ilmiah seorang akademisi. Pengkajian pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" diharapkan berguna dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan praktik penegakan hukum pidana. Oleh karena itulah pidato pengukuhan ini diberi judul :

**PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA SECARA
RETROAKTIF
SEBAGAI PENYEIMBANG
ASAS LEGALITAS DAN ASAS KEADILAN**

(SUJATU PERGESERAN PARADIGMA DALAM ILMU HUKUM PIDANA)

Hadirin yang saya hormati.

Pendahuluan

Gedung Kembar *World Trade Center*, Gedung Pentagon dan sebuah Gedung di Pennsylvania yang menjadi sasaran serangan tanggal 11 September 2001 serta ledakan bom yang terjadi di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang meluluhlantakkan *Sari Café* dan *Paddy's Club*, dua tempat hiburan yang terletak di Jalan Legian Kuta Bali telah menimbulkan korban ratusan jiwa melayang dan harta benda yang nilainya ratusan juta rupiah.

Dilihat dari sudut korban akibat ledakan bom di Bali yang berupa korban jiwa yang jumlahnya ratusan jiwa serta rusaknya bangunan, sebenarnya tidak merupakan permasalahan yang luar biasa dari kacamata hukum pidana, karena hukum pidana yang ada (KUHP) dapat digunakan untuk menanggulangi serta membawa para pelaku pemboman ke muka pengadilan. Namun masalahnya tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa yang ratusan jiwa jumlahnya serta rusaknya bangunan *Sari Café* dan *Paddy's Club* saja, tetapi di belakang itu semuanya muncul pemberian nama atas perbuatan itu dengan sebutan "terorisme"

sehingga menimbulkan persoalan hukum. Persoalan hukum yang timbul adalah bahwa perangkat hukum yang ada tidak dapat digunakan untuk menuntut para pelaku peledakan bom tersebut ke depan pengadilan, seolah-olah ada kekosongan hukum guna menangani masalah "terorisme".

Kepentingan hukum yang dibahayakan oleh tindakan terorisme, tidak hanya berupa jiwa dan harta benda, tetapi juga rasa takut masyarakat, kebebasan pribadi, integritas nasional, kedaulatan negara, fasilitas internasional, instalasi publik, lingkungan hidup, sumber daya alam nasional serta sarana transportasi dan komunikasi. Terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Terorisme dipandang sebagai kejahatan yang tidak biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra legal instrument*) pula, dengan didasarkan pada pertimbangan "adanya kebutuhan yang sangat mendesak" perlu diatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.¹⁾ Permasalahan yang akan dikaji dalam masalah

**Pasal 46 Perpu No.
1 Tahun 2002**

terorisme ini bukanlah wadah pengaturan tindak pidana terorisme dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), melainkan pernyataan dalam Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002, yang menyebutkan : "Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri". Dengan demikian, terhadap kasus-kasus terorisme yang terjadi sebelum Perpu No. 1 Tahun 2002 diundangkan berlaku Perpu No. 1 Tahun 2002 dengan pembatasan bahwa pernyataan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2002 harus dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang berarti berlakunya tidak serta merta atau tidak secara otomatis.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002, Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali. Perpu No. 2 tahun 2002 ini dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2003 ditingkatkan menjadi Undang-Undang, sedangkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditingkatkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali oleh Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, telah dibatalkan. Pembatalan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 ini, membawa implikasi yang sangat luas terutama dalam upaya mencegah dan memberantas terorisme, serta membuka cakrawala pengkajian yang lebih mendalam baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional guna mensejajarkan terorisme sebagai kejahatan internasional seperti halnya dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Pernyataan diperbolehkannya berlaku surut ("retroaktif") Perpu No. 1 Tahun 2002 ini²⁾, mau tidak mau membawa konsekuensi dalam pembelajaran hukum pidana, bahwa ada wacana baru yang memerlukan pembahasan secara bulat dan tuntas ialah pemberlakuan "retroaktif" di samping asas legalitas yang memang tumbuh menjadi asas fundamental hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan serta asas

keadilan yang menjadi tujuan akhir dari hukum termasuk hukum pidana.

Hadirin yang saya hormati.

Pemberlakuan Hukum Pidana

Apabila membahas pemberlakuan hukum pidana, secara garis besar dapat dibedakan dua jenis pemberlakuan hukum pidana ialah pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan waktu dan pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan tempat.

Pertama, pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan waktu, mensyaratkan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana, harus ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Ini menunjukkan tidak ada pidana tanpa landasan perundang-undangan. Ilmu Hukum pidana menyebut ketentuan ini sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mempunyai makna tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Francis Bacon (1561. – 1626) seorang filsuf inggris merumuskan dalam adagium *nemo est lex,*

priusquam feriat (undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya), ini kiranya mencakup lebih dari sekedar itu, yakni juga mencakup pembenaran atas pidana yang dijatuhkan. Hanya bila ancaman pidana yang muncul terlebih dahulu telah difungsikan sebagai upaya pencegahan, maka menghukum dapat dibenarkan³⁾.

Kedua, pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan tempat, bahwa pemberlakuan hukum pidana selalu terikat pada masalah kewilayahan ialah terbatas pada wilayah negara tertentu.

Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa dalam dunia akademik di Fakultas Hukum, masalah pemberlakuan "retroaktif" ini hanya dibahas sebagai pelengkap pembahasan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas "retroaktif" barangkali akan menjadi semacam "pasal kering" kalau tidak ada "Bom Bali", kalau bukan dikatakan demikian, dan kalau tidak diterbitkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana terkandung atau dimana akan diterapkan asas "retroaktif".⁴⁾

Penerobosan terhadap asas legalitas, dimungkinkan dengan adanya ketentuan dalam

Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menentukan :

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP ini memberikan petunjuk kepada para penegak hukum pidana, bagaimana seharusnya menerapkan perundang-undangan pidana dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan terhadap perbuatan yang belum mendapat penyelesaian secara tuntas.

Tolok ukur

**penerapan Pasal 1
ayat (2) KUHP**

Tolok ukur penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah :

(1) Ada perubahan dalam perundang-undangan.

(2) Aturan yang meringankan bagi terdakwa.

Ad 1. Ada perubahan dalam perundang-undangan.

**Tiga teori
perubahan
perundang-
undangan**

Mengenai perubahan dalam perundang-undangan ini, ada tiga teori yang memberikan kriteria adanya perubahan. Pertama, teori/ajaran formal yang menentukan bahwa ada perubahan dalam perundang-undangan, jika dalam naskah aturan pidana, jadi dalam hukum pidana sendiri diadakan perubahan. Kedua, teori/ajaran material yang tidak terbatas menentukan semua undang-undang dalam arti material yang mengalami perubahan yang mempengaruhi aturan pidana dipandang sebagai perubahan perundang-undangan. Ketiga, teori/ajaran material terbatas

yang menentukan ada perubahan dalam perundang-undangan apabila ada perubahan dalam keyakinan hukum dalam hukum pidana.⁵⁾

Perubahan dalam perundang-undangan ini berhubungan dengan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ialah masalah tindak pidana, kesalahan dan sanksi pidana.

Yang berhubungan dengan masalah tindak pidana dapat berupa :

- (1) baik undang-undang lama maupun undang-undang baru sama-sama menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana.
- (2) undang-undang lama menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana aduan, sedangkan undang-undang baru menetapkan sebagai tindak pidana biasa.
- (3) undang-undang lama menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana biasa, sedangkan undang-undang baru menetapkan sebagai tindak pidana aduan, dan
- (4) undang-undang lama menetapkan sebagai tindak pidana, sedangkan undang-undang baru tidak lagi menetapkan sebagai tindak pidana.

Yang berhubungan dengan kesalahan dapat berupa :

- (1) undang-undang lama merumuskan kesengajaan sebagai unsur, sedangkan

undang-undang baru merumuskan kealpaan sebagai unsur.

(2) undang-undang lama merumuskan kealpaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru merumuskan kesengajaan sebagai unsur.

(3) undang-undang lama merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru tidak merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsure, dan

(4) undang-undang lama tidak merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur.

Yang berhubungan dengan sanksi pidana dapat berupa :

(1) sanksi pidana dalam undang-undang lama dan undang-undang baru sama beratnya;

(2) sanksi pidana dalam undang-undang lama lebih berat dari sanksi pidana dalam undang-undang baru, dan

(3) sanksi pidana dalam undang-undang lama lebih ringan dari sanksi pidana dalam undang-undang baru.

Ad 2. Aturan yang meringankan bagi terdakwa.

Yang meringankan. Ketentuan "dipakai" aturan yang

meringankan bagi terdakwa memberi petunjuk bahwa dalam hal ini ada pilihan hukum yang harus dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara yang belum mendapat penyelesaian secara tuntas dalam hal terjadi perubahan undang-undang. Pengertian paling ringan harus diartikan seluas-luasnya, dan tidak hanya mengenai pidananya saja, melainkan mengenai segala sesuatunya dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian sesuatu tindak pidana. Penentuannya harus dilakukan *in concreto* dan tidak *in abstracto*.⁶⁾

Aturan Peralihan.

Dengan demikian, Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan "Aturan Peralihan" yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP. Namun selama ini pendirian yang berkembang bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP ini, memberi peluang suatu perundang-undangan berlaku secara surut ("retroaktif") dalam hal undang-undang yang baru yang diterapkan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum ada perubahan perundang-undangan karena undang-undang baru dipandang meringankan terdakwa. Sepanjang undang-undang yang baru tidak meringankan/menguntungkan terdakwa, maka undang-undang baru tidak diterapkan dan yang diterapkan adalah undang-undang lama.

Makna “retroaktif”.

Masalah yang perlu mendapat pengkajian mendalam adalah makna dari “retroaktif” itu sendiri, artinya apakah masalah “retroaktif” hanya berlaku terhadap undang-undang baru yang menciptakan delik baru ataukah juga berlaku terhadap undang-undang baru yang merupakan perubahan dari undang-undang lama, sehingga tidak menciptakan delik baru. Saya sendiri berpendirian bahwa pemberlakuan “retroaktif” secara sempit ialah terbatas pada undang-undang baru yang menciptakan delik baru saja, dan terbatas pada delik baru yang memenuhi kriteria perbuatan-perbuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara, bangsa dan masyarakat. Di sini kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan kolektif baik kepentingan negara, bangsa maupun masyarakat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan aturan peralihan yang bersifat umum.

Barda Nawawi Arief berpendapat, penyebutan asas “retroaktif” untuk Pasal 1 ayat (2) KUHP kurang tepat, karena:

1. Pasal 1 ayat (2) sebenarnya tidak mengatur tentang prinsip “retroaktif” (undang-undang berlaku surut), tetapi mengatur tentang hukum yang berlaku dalam masa transisi dalam hal ada perubahan perundang-undangan dengan prinsip “hukum yang diberlakukan (dalam masa transisi) adalah hukum yang

menguntungkan/meringankan terdakwa. Jadi Pasal 1 ayat (2) mengandung prinsip, bahwa apabila dalam masa transisi menghadapi 2 (dua) pilihan perundang-undangan, maka harus "diterapkan/didahulukan hukum yang menguntungkan/meringankan". Jadi dapat dikatakan mengandung "asas subsidiaritas".

2. Istilah "retroaktif" memberi kesan, bahwa "undang-undang baru" yang diberlakukan surut, padahal menurut Pasal 1 ayat (2), "undang-undang lama" pun tetap dapat diberlakukan apabila menguntungkan/meringankan terdakwa.⁷⁾

Hadirin yang saya hormati.

Beberapa perundang-undangan selain Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melarang suatu perundang-undangan pidana berlaku surut, dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 4 UUD No. 39 Tahun 1999, menentukan :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". (garis bawah dari penulis)

penulis)

- Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999, menentukan :

"Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukannya".

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan tanggal 7 – 18 Agustus 2000, telah mengadakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu perubahan terhadap UUD 1945 adalah menambahkan satu bab sesudah Bab X ialah Bab X A tentang "Hak Asasi Manusia" (Pasal 28 A – Pasal 28 J).

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, menentukan :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun". (garis bawah dari penulis)

Dari ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, jelas bahwa "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut" merupakan hak absolut dari manusia yang tidak dapat dikurangi/dibatasi. Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 ialah "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" tidak berlaku mutlak, karena sesuai dengan penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 yang menerangkan :

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan".⁸⁾

Pengecualian terhadap pernyataan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut seperti tercantum dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip umum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melarang suatu aturan pidana berlaku secara "retroaktif".⁹⁾ Walaupun di dalam penjelasan tersebut dibatasi hanya terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang

digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pengecualian/seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melarang suatu aturan pidana berlaku surut, haruslah dipandang sebagai suatu penyimpangan dan masih dalam tingkatan undang-undang yang sederajat, sehingga di sini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* artinya undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum.

Hadirin yang saya hormati.

Pernyataan pemberlakuan secara "retroaktif" suatu perundang-undangan pidana akan menjadi permasalahan manakala pernyataan "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut" menjadi muatan materi dalam Undang-Undang Dasar, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰⁾

Derogable Rights.

Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, terdapat beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi/dikurangi dalam keadaan apapun, dimana salah satunya adalah "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut".¹¹⁾ Ini berarti hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan *derogable rights*, sehingga tidak bisa dikurangi/dibatasi, walaupun terdapat

ketentuan seperti dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang seolah-olah memberi peluang untuk menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28 J UUD 1945 menentukan :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut" dapat dibatasi/dikurangi. Apakah ketentuan yang menyatakan bahwa "setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang --- semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" berlaku untuk semua hak-

hak yang tercantum dalam ketentuan Bab X A UUD 1945, termasuk ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Padahal ketentuan Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pengecualian sebenarnya harus secara eksplisit ditentukan dalam pasal atau ayat tersendiri, seperti apa yang tercantum dalam Pasal 18 dari *Brisbane Ordonnantie*¹¹⁾ yang menentukan *Het bepaalde in art. 1 van het wetb.v.Strafr.wordt voor wat betreft de toepassing van deze ord.buiten werking gesteld*. Jadi ini sebetulnya menggarisbawahi ulang dalam konsiderans bahwa Pasal 1 KUHP (WvS) tidak bisa atau tidak akan diterapkan. Jadi asas "retroaktif" dalam sejarah hukum pidana (WvS yang masih berlaku) bukanlah sesuatu yang baru. Apa yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHP bertalian dengan diterapkannya ordonansi ini, tidak digunakan.¹²⁾

Hadirin yang saya hormati.

Asas legalitas.

Asas *lex temporis delicti*.

Asas "non retroaktif"

Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung makna asas *lex temporis delicti* artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas "non retroaktif", artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga

berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*non-retroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).¹³⁾

lex certa

Sehubungan dengan makna Pasal 1 ayat (1) KUHP, disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin, yang dikenal dengan asas *lex certa* yang berarti undang-undang yang dapat dipercaya. Di sini undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat. Dengan demikian, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan "fungsi melindungi" dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi undang-undang pidana juga mempunyai "fungsi instrument" : di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.¹⁴⁾

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin :

- *nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- *nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;

- *nulla crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat : *nullum crimen nulla poena sine praevia lege* : tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.¹⁵⁾

Dua fungsi yang diemban/dibebankan pada asas legalitas ialah fungsi instrument yang berarti tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut, dan fungsi melindungi yang berarti tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang, memungkinkan terjadinya cacat-cacat atau melemahnya penerapan asas legalitas itu sendiri.

Karakteristik asas legalitas.

Asas legalitas sebagaimana karakteristik aslinya, mengandung tujuh aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d. tidak boleh ada rumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- e. tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f. tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan dalam undang-undang;
- g. penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.¹⁶⁾

Tujuan asas legalitas.

Asas legalitas dilihat dari kelahirannya dilatarbelakangi oleh adanya perlindungan hak asasi manusia dari perbuatan penguasa yang

arbitrair pada waktu itu sekaligus juga menciptakan adanya kepastian hukum.

Menurut Muladi, secara keseluruhan tujuan dari asas legalitas, adalah :

- (1) memperkuat kepastian hukum;
- (2) menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- (3) mengefektifkan fungsi pencegahan (*deterrent function*) dari sanksi pidana;
- (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan
- (5) memperkuat penerapan *rule of law*.¹⁷⁾

Beberapa ketentuan internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia (*human rights*) juga mencantumkan asas legalitas yang melarang berlakunya perundang-undangan pidana secara "retroaktif".

a. Artikel 11 paragraf 2 Deklarasi HAM PBB (1948) :

"Seseorang tidak dapat dituduh bersalah dengan kesalahan pidana atas dasar tindakan atau kelalaian yang tidak termasuk kejahatan pidana, baik di bawah hukum nasional maupun internasional, pada saat dilakukan. Hukuman yang lebih berat juga tidak bisa dijatuhkan dibanding hukuman yang bisa diterapkan pada saat kejahatan pidana dilakukan".¹⁸⁾

- b. Artikel 15 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, menentukan :

"Tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuk suatu tindak pidana yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu dilakukan. Pidana yang lebih berat dari yang diancamkan pada saat delik dilakukan, juga tidak dapat dijatuhkan. Apabila setelah delik dilakukan undang-undang membuat ketentuan untuk mengenakan pidana yang lebih ringan, pelaku delik harus dapat keuntungan dari ketentuan itu".¹⁹⁾

- c. Statuta Roma tentang Pembentukan Peradilan Pidana Internasional, juga memuat beberapa artikel yang mengandung asas legalitas, sebagai berikut :

1. *Article 22 Nullum crimen sine lege.*

(1) *A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it take place, a crime within the jurisdiction of the court.*

(2) *The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy in case of ambiguity, the definition shall be*

interpreted in favor of the person being investigated, prosecuted or convicted.

(3) *This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this Statute.*²⁰⁾

2. Article 23 *Nulla poena sine lege.*

*A person convicted by the court may be punished only in accordance with this Statute.*²¹⁾

3. Article 24 *Nonretroactivity ratione personae.*

(1) *No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior entry into force of the Statute.*

(2) *In the event of change in the applicable to a given case prior to a final judgment, the law more favorable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.*²²⁾

Hadirin yang saya hormati.

Sisi individu dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

Permasalahan penanggulangan kejahatan dapat didekati dari dua sisi, yakni dari sisi individu dan dari sisi masyarakat. Dari sisi individu yang menjadi objek adalah keharusan untuk melindungi

individu terhadap negara (*to protect the individual against the state*). Hal ini diekspresikan dalam bentuk peribahasa (*maxim*) : *Nulla poena sine lege*. Dari sisi masyarakat yang menjadi objek adalah keharusan untuk melindungi masyarakat terhadap penjahat yang tercermin dari pepatah : *Nullum crimen sine poena*.²³⁾ Perlindungan individu (pelaku tindak pidana/kejahatan) diwujudkan dalam bentuk asas legalitas yang menghendaki adanya kepastian hukum. Dalam perkembangan berlakunya asas legalitas ini mengalami penyimpangan/pergeseran sesuai dengan perkembangan dari masyarakat dimana asas legalitas itu merupakan asas yang fundamental dari hukum pidana yang berlaku pada masyarakat tersebut.

**Pergeseran /
penyimpangan asas
legalitas.**

Beberapa pergeseran / penyimpangan terhadap asas legalitas terlihat dalam perundang-undangan nasional, jurisprudensi serta konvensi internasional yang mengakui di samping hukum nasional dan hukum internasional serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa atau hukum tidak tertulis, sebagai sumber hukum.

Pergeseran/penyimpangan tersebut, terlihat seperti dalam uraian berikut :

- a. Pergeseran/penyimpangan asas legalitas

Pasal 103 KUHP.

secara yuridis formal dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIll buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". (garis bawah dari penulis)

Masalah ini masih bisa diperdebatkan (*debatable*) karena berupa asas yang fundamental, apakah semudah itu dapat disimpangi.

Pasal 1 ayat (2) KUHP.

- b. Penyimpangan asas legalitas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengandung prinsip apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah tindak pidana terjadi, dipakai undang-undang yang paling menguntungkan/ meringankan terdakwa.

Sejarah berlakunya KUHP.

- c. Dari aspek sejarah berlakunya KUHP (aslinya *Wetboek van Strafrecht*) di jaman Belanda ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang dan Belanda mengungsi ke Australia, Penjajah Belanda pernah mengeluarkan *Staatsblad* yang disebut S.45-135 atau juga disebut *Brisbane Ordonnantie*. Pertimbangan dikeluarkannya ordonansi ini, seperti dikutip

oleh J.E. Sahetapy, adalah :

1. "... *in het belang van de veiligheid van den staat ...*". Dengan perkataan lain, "kepentingan keamanan dari negara";
2. "... *begane feiten welke in zoo ernstige mate strafwaardig zijn ...*". Ini berarti "perbuatan-perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan mana berbahaya yang patut dipidana";
3. "... *zonder dat een beroep op het bepaalde in art.1 van het wetb.v.Strafr.bij die berechting dient to worden toegelaten*". Dengan perkataan lain, "tanpa memperhatikan atau menggunakan ketentuan Pasal 1 dari KUHP (baca W.v.S).²⁴⁾

Dengan demikian, demi kepentingan keamanan negara, maka perbuatan-perbuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara, bangsa dan masyarakat yang patut dipidana, pembentuk undang-undang dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 1 KUHP yang melarang suatu undang-undang pidana berlaku surut. Pemberituk undang-undang dapat menciptakan undang-undang pidana yang dapat

dijadikan dasar hukum guna menuntut dan memidana suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau, asalkan perbuatan tersebut berbahaya bagi negara, bangsa dan masyarakat atau membahayakan keamanan negara.

**UU No. 1 Drt 1951
dan UU No. 4 Tahun
2004**

- d. Dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan yang memberikan peluang untuk tidak memberlakukan asas legalitas secara mutlak ialah UU No. 1 Drt. 1951 dan UU No. 4 Tahun 2004. Pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt. 1951 serta Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, memberikan landasan hukum bagi diterapkannya hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis untuk menuntut dan memidana suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang menurut hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis perbuatan tersebut dapat atau patut dipidana. Di sini kriteria untuk menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis. Dengan demikian, undang-undang pidana dan hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis mempunyai kedudukan yang sama, ialah sama-sama sebagai sumber

hukum pidana.

**Yurisprudensi
Indonesia dan teori
hukum pidana.**

- e. Dalam yurisprudensi Indonesia dan juga perkembangan teori dikenal ajaran "sifat melawan hukum yang material". Yurisprudensi Indonesia pada intinya menentukan suatu perbuatan dapat hapus sifatnya sebagai melawan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yurisprudensi yang dapat dikatakan sebagai tonggak diadunya ajaran sifat melawan hukum material oleh lembaga pengadilan adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966, yang menyatakan :

**Keputusan MARI
No.42/K/Kr/1965.**

**Asas-asas keadilan
atau asas hukum
tidak tertulis dan
bersifat umum.**

"Sesuatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum sebagai misalnya 3 (tiga) faktor : (1) negara tidak dirugikan, (2) kepentingan umum dilayani, dan (3) terdakwa tidak dapat untung. Ajaran sifat melawan hukum material dibedakan menjadi 2 (dua), ialah (1) sifat melawan hukum material

**Sifat melawan
hukum material
dalam fungsinya**

yang negatif dan positif.

dalam fungsinya yang negatif, mengakui hal-hal di luar undang-undang (hukum tidak tertulis) dapat menghilangkan sifatnya sebagai melawan hukum suatu perbuatan yang tegas-tegas dinyatakan sebagai delik dalam undang-undang, dan (2) sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif

- f. Dokumen-dokumen internasional juga memberi peluang diterapkannya "prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa" atau "hukum kebiasaan internasional" seperti :

**Artikel 15 ayat (2)
Konvensi
Internasional
tentang "Hak-hak
Politik dan Sipil".**

1. Artikel 15 ayat (2) Konvensi Internasional tentang "Hak-hak Politik dan Sipil" ialah :
"Tidak sesuatupun dalam pasal ini yang akan menghambat hak pengadilan dan pemidanaan terhadap perbuatan seseorang (tidak berbuat) yang pada saat dilakukan merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.²⁵⁾
2. Artikel 15 Konvensi Internasional tentang "Hak-hak Politik dan Sipil", memuat sumber hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mempertanggungjawabkan seseorang secara pidana ialah (1) hukum nasional

**IMT, IMTEE, ICTY,
ICTR.**

atau internasional dan (2) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

3. Pembentukan (a) *The International Military Tribunal* (IMT) yang berkedudukan di Nurenberg; (b) *the International Military Tribunal for the Far East* (IMTEE) yang berkedudukan di Tokyo; (c) *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* di Den Haag; dan (d) *The International Criminal Tribunal* untuk Rwanda di Arusha.²⁶⁾ yang mengadopsi hukum kebiasaan internasional guna mengadili dan memidana para pelaku kejahatan perang atau para pelaku kejahatan genosida atau para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga mereka tidak diuntungkan dengan adanya praktik *impunity*.

RUU-KUHP.

**Pergeseran asas
legalitas dari formal
ke material.**

- g. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 1999/2000 (*ius Constituendum*) terdapat pergeseran asas legalitas dari asas legalitas formal ke asas legalitas material dalam menentukan criteria suatu perbuatan dapat dipidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 RUU-KUHP Tahun 1999/2000.

Pasal 1 RUU-KUHP Tahun 1999/2000, menentukan :

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. (garis bawah dari penulis)
- (4) Terhadap perbuatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 93.²⁷⁾

Pasal 43 (1) UU No.

26 Tahun 2000 dan

Pasal 46 UU

No.1/Prp/ 2002.

- h. Fenomena legislatif akhir-akhir ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang "Pengadilan Hak Asasi Manusia" dan Pasal 46 UU No. 1/Prp/2002 tentang "Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme²⁸⁾, yang pada intinya kedua undang-undang tersebut dapat diberlakukan surut terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut. Hanya saja guna menyatakan berlaku surut kedua undang-undang tersebut menetapkan persyaratan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (*political wisdom*).

Hadirin yang saya hormati.

**Sumber hukum
tertulis dan tidak
tertulis.**

Dari beberapa perundang-undangan maupun dokumen internasional yang telah dipaparkan nampak adanya pergeseran dari asas legalitas yang semula diartikan *nullum delictum, nulla poena sine lege* semata-mata, bergeser dan diartikan juga sebagai *nullum delictum, nulla poena sine iure*. Dengan meminjam istilah Barda Nawawi Arief, tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas material yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum.²⁹⁾

Konvensi-konvensi hukum pidana internasional banyak yang merupakan manifestasi dari praktik hukum kebiasaan internasional, maka *maxim nullum crimen sine lege* bergeser menjadi *nullum crimen sine iure* (tiada kejahatan tanpa hukum), yang menjadi pedoman asas legalitas

hukum pidana internasional. Sebagai contoh adalah praktik IMT Nuremberg tidak menumbuhkan preseden, karena hal tersebut tidak menciptakan hukum baru karena semata-mata menerapkan hukum yang sudah ada di dalam *International Agreement* tentang *war criminals*. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) tidak ada kaitannya dengan asas legalitas, sebab kejahatan tersebut semata-mata merupakan perluasan yurisdiksi dari kejahatan perang (*as an outgrowth of war crimes*).³⁰

Kepentingan kolektif.

Menurut Muladi, mereka yang menentang asas "non-retroaktivitas" mendasarkan diri pada hipotesis bahwa hukum yang baru selalu lebih baik daripada hukum sebelumnya. Manfaat (*efficacy*) sedapat mungkin harus diperluas, dengan maksud untuk mengkomunikasikan peningkatan kualitasnya dalam lingkup yang lebih luas. Penerapan hukum pidana secara "retroaktif" dapat memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat (*society retribution*) terhadap pelaku kejahatan. Pendukung penerapan hukum pidana secara "retroaktif" hanya ingin memberlakukannya dalam kondisi perkecualian tertentu (*exceptional circumstances*) seperti *morally wrong*, si pelaku melampaui batas-batas hukum alam (*the wrongdoer has transgressed the natural law*). Utrecht dalam hal ini menganggap bahwa

asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif. Ada perbuatan-perbuatan yang *strafwaardig* tetapi tidak *strafbaar*".³¹⁾

**Penyeimbang
kepastian hukum
dan keadilan.**

Pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" di tingkat internasional dan nasional didasarkan atas "*International Customary Law*" dan "*The Principles of Justice*". Asas legalitas yang hanya memberikan perlindungan kepada individu dari kesewenang-wenangan penguasa demi kepastian hukum dan tidak atau kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan kolektif serta korban kolektif. Ini berarti asas legalitas kurang memperhatikan akses untuk memperoleh keadilan untuk semuanya atau *access to justice for all*. Dengan demikian, pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" yang didasarkan pada prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana menjadi penyeimbang asas legalitas yang hanya mengejar "kepastian hukum" dan asas keadilan. Menurut Ulpianus, bahwa *Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens* yang berarti "Keadilan ialah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya".³²⁾

Hadirin yang saya hormati.

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dapat

disimpulkan bahwa.

Pertama, asas legalitas yang pada intinya berisi asas *lex temporis delicti* hanya memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana dan kurang memberikan perlindungan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat.

Kedua, asas legalitas atau *principles of legality* walaupun diakui sebagai asas yang fundamental oleh negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak secara mutlak dalam arti pembentuk undang-undang dapat menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi sebagai tindak pidana dan dapat dipidana asalkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang dalam hukum pidana internasional disebut "prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa".

Ketiga, pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" merupakan pengecualian dari asas legalitas atau *principle of legality* atas dasar *extra ordinary crimes*, seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat.

dilakukan dengan menyamakan Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum, tetapi juga diperlukan langkah-langkah berupa pertemuan-pertemuan dosen sejenis yang sampai saat ini ada yang berjalan dengan teratur, dan ada yang tersendat-sendat. Adanya asosiasi seperti Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI) dan Forum Komunikasi Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia (FORKAPHI) dapat mengisi kekosongan pendidikan hukum pada masa yang akan datang, di samping pendidikan klinis hukum yang memang sudah seharusnya dikembangkan.

Secara khusus, dengan diakuinya pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" baik di tingkat internasional maupun nasional dengan landasan *International Customary Law* dan *The Principle of Justice*, sudah selayaknya ilmu hukum pidana mengalami pengembangan, yang semula seolah-olah hanya mengutamakan "kepastian hukum" dikembangkan dengan prinsip "keadilan untuk semuanya". Pengembangan ilmu hukum pidana dalam kerangka dasar umum (*general basic framework*) yang menjadi pedoman kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus dalam lingkungan masyarakat ilmuwan hukum pidana. Kerangka dasar ilmu inilah yang dimaksud dengan paradigma

dalam hukum pidana. Istilah paradigma di sini menunjuk pada cara pandang dan atau kerangka berpikir yang berdasarkaninya fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami atau kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin.³³⁾

Kerangka kegiatan pengembangan ilmu hukum pidana yang semula hanya menjelaskan asas legalitas dengan segala konsekuensinya, sudah selayaknya dikembangkan ke asas legalitas dalam arti material serta pengembangan bahwa asas legalitas dan pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" akan berjalan seiring demi menciptakan keadilan untuk semuanya.

Hadirin yang saya hormati.

**Harapan dan pesan
kepada mahasiswa.**

Para mahasiswa Strata 1 Ilmu Hukum, Strata 2 Ilmu Hukum maupun Strata 3 (Program Doktor) Ilmu Hukum, pengalaman saya selama kurang lebih 28 tahun menjadi dosen, hampir 24 tahun berkecimpung di dunia praktik hukum (penasihat hukum) menyadarkan saya bahwa pendidikan formal di Fakultas Hukum hanya memberikan kematangan intelektual. Oleh karena itu para mahasiswa harus melengkapinya dengan kemampuan untuk menghadapi pasaran kerja dan perubahan sosial yang sangat cepat dengan melalui pendidikan ekstra dan ko-kurikuler dan

berperan serta dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan yang menjadikan para mahasiswa memperoleh kematangan sikap pribadi

Di samping itu, demi keberhasilan mencapai cita-cita, maka belajarliah dengan sungguh-sungguh serta dengan tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita. Hanya para mahasiswa sendirilah yang dapat mengubah keadaan para mahasiswa. Di tangan Saudara-saudaralah yang paling menentukan apakah Saudara-saudara akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Kepada kolega saya yang masih muda-muda pergunakanlah kesempatan yang serba terbuka ini guna meningkatkan jenjang akademik ke jenjang yang lebih tinggi baik Strata 2 maupun Strata 3 karena jenjang akademik yang tertinggi itulah kebanggaan kita sebagai seorang akademisi.

Pesan klasik dari pendahulu-pendahulu saya kiranya perlu juga saya kemukakan bahwa untuk menjadi Ahli Hukum yang sejati, orang harus mempunyai sifat *homo ethicus* (manusia susila), *homo politicus* (manusia mempunyai kecakapan memenuhi dinamika hukum, menyesuaikan hukum dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan hidup bersama) dan *homo juridicus* (manusia mempunyai kecakapan teknis juridis). *Jurist* adalah

homo juridicus, karena dalam bidang hukum kita tidak hanya menangani hukum, melainkan kita juga berhadapan dengan soal *ethis*, *jurisi* juga menangani soal etika. Oleh karena itu *jurist* yang baik ialah *jurist* yang lebih daripada *jurist* atau *de georde jurist is meer dan alleen jurist*.

Hadirin yang saya hormati.

**Ucapan terima
kasih.**

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini, sekali lagi menanjatkan puji syukur kepada Hyang Widhi Waca, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengijinkan saya untuk menyandang jabatan Guru Besar yang penuh kehormatan ini. Rasanya berat sekali kewajiban yang harus saya emban.

Ucapan dan penghargaan seria terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana.

Kepada Yth. Prof. Ir. Eko Budihardjo M.Sc., baik selaku Rektor Universitas Diponegoro maupun selaku Ketua Senat Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan mengusulkan kenaikan jabatan ke Guru Besar ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Yth. Prof. dr. Soebowo, Sp.PA, Sekretaris Senat Universitas Diponegoro, Prof. Ir. Yutata Hadihardaya, Prof. Drs. Y. Warella. MPA, Ph.D, Dewar. Guru Besar, Anggota Senat lainnya, Para Pembantu Rektor, H. Achmad Busro, SH.MHum, Dekan/Ketua Senat Fakultas Hukum, para Pembantu Dekan, para anggota Senat dan para dosen beserta staf akademis dan administrasi, para alumni serta para mahasiswa saya ucapkan terima kasih atas segala pengertian dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk maju.

Ucapan terima kasih secara khusus saya haturkan kepada Bapak Prof. H. Sudarto, SH, almarhum, guru saya yang sangat saya hormati dan banggakan. Beliau telah membimbing saya pada saat untuk pertama kalinya masuk menjadi dosen di Fakultas Hukum menjadi asisten beliau dan selalu mendorong saya untuk maju. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat dan tak akan lupa dorongan beliau dengan ungkapan "... Nyoman!... Nyoman harus melanjutkan ke S2, kalau tidak, Nyoman nanti kalah sama teman-teman yang lain". Saya berusaha untuk mewarisi sikap-sikap beliau yang jujur, disiplin, sederhana dan sikap-sikap ilmiah yang lain yang patut diteladani. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang lapang, sesuai dengan

amal dan baktinya di masyarakat.

Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muladi, SH., promotor saya pada waktu saya mengambil gelar Doktor di Universitas Indonesia beserta Ibu Hj. Nany Ratna Asmara Muladi, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga serta dorongan kepada saya dan juga bantuan baik material maupun immaterial. Begitu juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH.MH., yang menjadi Ko-Promotor pada waktu saya mengambil gelar Doktor di Universitas Indonesia, saya ucapkan banyak terima kasih.

Kepada Rektor Universitas Indonesia, Direktur Pasca Sarjana Universitas Indonesia; saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program Doktor, begitu juga kepada Tim Penguji pada waktu saya ujian Doktor, Prof. Dr. H. Muladi, SH., Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH.MH., Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH.MA., Prof. Dr. Rony Nitibaskara, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Dr. Jufrina Rizal, SH.MA., dan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.MA., saya ucapkan banyak terima kasih.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH., yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan,

nasihat untuk kemajuan saya. Begitu pula kepada Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., yang mendorong saya untuk maju. Kepada Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH., beserta Ibu yang telah saya anggap sebagai orang tua saya di Semarang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dorongan dan dukungan demi kemajuan saya.

Kepada Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Prof. Dr. Mu'adi, SH., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Prof. IGN. Sugangga, SH., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Prof. Dr. Gunawan Setiardjo, Prof. H. Abdullah Kelib, SH., Prof. Dr. Esmi Warasih Pudjirahayu, SH.Ms., Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH., saya mengucapkan terima kasih atas segala dorongan dan semangat yang diberikan kepada saya.

Kepada guru-guru saya di Sekolah Rakyat Dapdap Putih Bali, Sekolah Menengah Pertama Bhaktiyasa A Singaraja, Sekolah Menengah Atas Negeri Singaraja, serta dosen saya semasa saya mengikuti kuliah di Fakultas Hukum UNDIP, Magister Hukum di KPK UI-UNDIP dan Doktor di UI, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Kepada Yth. Prof. Dr. Muladi, SH., sebagai Ketua Peer Group, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Sekretaris Peer Group, dan Prof. dr. H.

Soebowo, DSPA., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Prof. H. Abdullah Kelib, SH., Prof. Dr. Ir. Suharjo Hadisaputra. Sp.PD(KTI), Prof. Drs. Y. Warella, MPA.Ph.D., Prof. Dr. Lachmuidin Sya'rani, Prof. Drs. Soedjarwo, sebagai Anggota Peer Group saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas asupan dalam penyempurnaan pidato pengukuhan ini.

Kepada almarhum Ayah Ketut Tjandi dan almarhumah Ibu Ni Nengah Siwi yang saya hormati dan saya cintai (telah meninggalkan saya sejak saya Kelas 2 SR), saya haturkan sembah bakti serta permohonan maaf yang tak terhingga dan terima kasih atas doa restu yang diberikan kepada saya. Begitu juga kepada almarhum Paman Ketut Mastra dan Bibi Ni Nengah Kentri yang menjadi Ayah dan Ibu saya sebagai pengganti kedua orang tua yang telah tiada, saya menghaturkan sembah bakti dan disertai permohonan maaf yang tak terhingga dan terima kasih tiada terkira atas keprihatinan dan doa restu yang telah saya nikmati pada masa-masa yang lalu.

Demikian pula kepada yang saya cintai almarhum Bapak B. Soeprajitno dan almarhumah Ibu Maria Hartini, mertua saya, saya haturkan terima kasih yang tak terhingga atas doa restunya.

Kepada Istriku Agustina Maria Sri Bintarti,

SH.MHum., yang saya cintai yang telah mendampingi hidup saya selama 26 tahun yang dengan penuh pengertian dan penuh pengorbanan selama ini, sehingga cita-cita saya dapat berhasil mencapai derajat akademik tertinggi serta jabatan akademik tertinggi dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kepada anak-anakku Putu Elly Saraswati ST., Nengah Reza Narendra Putra, SH., dan Nyomen Roy Mahendra Putra, Bapak mengucapkan terima kasih atas kerelaannya untuk tidak banyak mengganggu Bapak serta selalu mendorong Bapak untuk mencapai derajat akademik tertinggi serta jabatan akademik tertinggi ini.

Kepada seluruh anggota Panitia yang telah bekerja keras dalam acara pengukuhan ini, saya sekeluarga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa bantuan saudara-saudara acara pengukuhan ini tidak mungkin berjalan seperti yang diharapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu namun tanpa mengurangi makna serta penghargaan yang setulus-tulusnya atas semua bentuk bantuan, perhatian, dorongan serta bimbingan yang telah diberikan kepada saya tersebut menjadi amal di hadapan-Nya.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.



SUMBER KUTIPAN DAN CATATAN

Periksa bagian menimbang huruf f Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif.

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 356-357.

J.E. Sahetapy, "Asas Retroaktif : Suatu Kajian Ulang", Wacana Dalam Komisi Hukum Nasional, KHN, Newsletter, Edisi Mei 2003, hal. 22.

Jan Remmelink, Op.Cit., hal.365-366.

Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), hal. 29.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8-9.

Sangat disayangkan pengecualian terhadap "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut terdapat dalam penjelasan pasal demi pasal, akan lebih kuat apabila pengecualian tersebut diatur dalam ayat tersendiri.

- 9) Berlaku secara "retroaktif" berarti suatu undang-undang pidana yang ditetapkan dapat diterapkan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang itu diberlakukan.
- 10) Sehubungan dengan berlaku "retroaktif" ini, Sudarto berpendapat : Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk undang-undang sebab aturan itu hanyalah tercantum dalam undang-undang biasa. Jadi apabila pembentuk undang-undang menyatakan suatu undang-undang berlaku surut, hal tersebut adalah sepenuhnya hak pembentuk undang-undang sendiri. Di sini berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terdahulu. Lain halnya, jika aturan ini (maksudnya ketentuan "retroaktif") masuk dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (Pasal 14 ayat 2) yang sejak tanggal 17 Agustus 1959 tidak berlaku lagi, Pasal 14 ayat 2 itu berbunyi : "Tiada seorang pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena Aturan Hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya".

Dalam hal ini maka pernyataan berlaku surutnya suatu peraturan pidana oleh pembentuk undang-undang akan dapat dikatakan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang merupakan dasar, merupakan rangka dari tata hukum Negara Republik Indonesia. Segala perundang-undangan Indonesia tidak boleh berlawanan dengan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Lihat Sudarto, Hukum Pidana I, Op.Cit., hal.25.

- 11) Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi sesuai dengan Pasal 28 I ayat (1) meliputi : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

- 12) J.E. Sahetapy, Op.Cit., hal. 21.
- 13) Lihat Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta, The Habibie Center, 2002), hal. 73.
- 14) D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, Editor Penerjemahan J.E. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K (Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1995), hal. 4.
- 15) Ibid., hal. 5.
- 16) Ibid., hal. 6-7.
- 17) Muladi, Op.Cit., hal. 74.
- 18) Ibid., hal. 76.
- 19) Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 4-5.
- 20) Lihat Rome Statute of International Criminal Court, 17-7-1998.
- 21) Ibid.
- 22) Ibid.
- 23) Muladi, Penerapan "Asas" Retroaktif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Makalah pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 26-27 April 2004, hal. 5.
- 24) J.E. Sahetapy, Op.Cit., hal. 21.
- 25) Artikel 15 ayat (2) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sipil, menentukan : Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the

time when it was committed, was criminal according to the generale principles of law recognized by the community of Nations".

- 26) Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Op.Cit., hal. 122.
- 27) Lihat Direktorat Perundang-Undangan Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, RUU-KUHP Tahun 1999/2000.
- 28) Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, berbunyi :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”.

Pasal 46 UU No. 1/Prp/2002 berbunyi :

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang iri, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri”.
- 29) Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 10.
- 30) Muladi, Penerapan “Asas” Retroaktif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Op.Cit., hal. 11-12.
- 31) Ibid., hal. 8.
- 32) O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta, BPK. Gunung Mulia. 1975), hal. 53.
- 33) Lihat Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, sebagaimana dikutip oleh : Arief Sidharta, “Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis” Makalah Pada Simposium Ilmu

Hukum "Paradigma Dalam Ilmu Hukum Indonesia", diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNIDIP ke-41 bekerja sama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 10 Februari 1998, hal. 17.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, "Paradigma Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis", Makalah pada Simposium Nasional Ilmu Hukum "Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia" Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-41 bekerja sama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- D. Schaffmeiser, N. Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor Penerjemahan : J.E. Sahetapy, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Penerbit The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- , Pro Dan Kontra RUU Terorisme, Makalah dalam Diskusi Panel yang diadakan Launching Komunitas Wedangjae, Tahun 2002.
- , Tinjauan Kritis Terhadap Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Kajian Dari Aspek Yuridis), Makalah dalam Studium Generale FH UNDIP Tahun 2003.

- , Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Catatan Terhadap Rencana RUU Perubahan Undang-undang Anti Terorisme), Makalah dalam Seminar Di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 6 November 2003.
- Soedjono Dirdjosisworc, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Penerbit Yayasan Sudarto, 1990.
- , Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Direktorat Perundang-Undangan Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, RUU-KUHP 1999/2000.
- Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Tengah, 2000, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 7-18 Agustus 2000.
- Sekretariat Jendral MPR RI, Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001.
- Universal Declaration of Human Right, 1948.
- Rome Statute of International Criminal Court, 17-7-1998.
- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
- Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme".
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia".
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang "Pengadilan Hak Asasi Manusia"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Nyoman Serikat Putra Jaya
2. NIP : 130 529 433
3. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
4. Jabatan : Guru Besar
5. Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja-Bali, 12 Desember 1948.
6. Agama : Hindu Dharma
7. Istri : Agustina Maria Sri Bintarti,
SH.MHum.
8. Anak-anak : 1. Putu Elly Saraswati, ST.
2. Nengah Reza Narendra P, SH.
3. Nyoman Roy Mahendra Putra
Mahasiswa Fakultas Hukum
UNDIP.
9. Alamat : Gombel Permai XVI/471 Semarang.

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Rakyat : Di Dapdap Putih Singaraja Bali Lulus Tahun 1961
2. SMP Bhaktiyasa A : Di Singaraja Bali Lulus Tahun 1964.
3. SMA Negeri : Di Singaraja Bali Lulus Tahun 1967.
4. Sarjana Hukum : Fak. Hukum UNDIP Semarang Lulus Tahun 1975
5. Magister Hukum : KPK UI-UNDIP Semarang Lulus Tahun 1988.
6. Doktor Ilmu Hukum : Universitas Indonesia Lulus Tahun 2002.

C. Pendidikan Tambahan

1. Penataran Pengembangan Metode Pengajaran di UNDIP Tahun 1978.
2. Kursus Bahasa Inggris di UNDIP Tahun 1980.
3. Program Akta Mengajar Lima Format Belajar Jarak Jauh Tahun 1981/1982.
4. Penataran Hukum Pidana di UNDIP Tahun 1987.
5. Penataran Rekonstruksi Kuliah Angkatan Ke III di UNDIP Tahun 1988.
6. Penataran Hukum Pidana di Purwokerto Tahun 1990.
7. Kursus Bahasa Belanda di Erasmus Jakarta Tahun 1991.
8. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim HAM AD HOC di Jakarta Tahun 2002.

I. Riwayat Jabatan

a. Riwayat Kepegawaian

1. Calon Pegawai : III a Tahun 1976
2. Penata Muda : III a Tahun 1977
3. Penata Muda Tk. I : III b Tahun 1978
4. Penata : III c Tahun 1980
5. Penata Tk. I : III d Tahun 1983
6. Pembina : IV a Tahun 1986
7. Pembina Tk. I : IV b Tahun 1990
8. Pembina Utama Muda : IV c Tahun 1994

b. Riwayat Jabatan

1. Asisten Ahli Madya : Tahun 1977
2. Asisten Ahli : Tahun 1978
3. Lektor Muda : Tahun 1980
4. Lektor Madya : Tahun 1983
5. Lektor : Tahun 1986
6. Lektor Kepala Madya : Tahun 1990
7. Lektor Kepala : Tahun 1994
8. Guru Besar : 1 Februari 2002

E. Pengalaman Jabatan

a. Di Lingkungan UNDIP

1. Ketua Badan Konsultasi Hukum (BKUH) UNDIP Tahun 1986-1991.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana UNDIP Tahun 1996-2003.
3. Anggota Badan Perencanaan dan Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP Tahun 2004 – sekarang.

b. Di Luar Lingkungan UNDIP

1. Penasihat Akademik Fakultas Hukum UNIKAL Tahun 1992-1999.
2. Anggota Tim Penatar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Hukum Tahun 1997-1998.
3. Anggota Tim Telaah Akademik Terhadap Jurisprudensi Tentang Tindak Pidana Korupsi, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tahun 2003.
4. Anggota Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tahun 2003.

5. Ketua Tim Telaah Akademik Anotasi Yurisprudensi tentang Pelanggaran HAM Berat, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tahun 2004.

F. Kepengurusan dan Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

1. Anggota PGRI
2. Wakil Bendahara Pengurus Pusat ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi) tahun 1989 – sekarang.
3. Wakil Ketua DPD FORKAPII (Forum Komunikasi Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia) Tahun 2003 – sekarang.

G. Tanda Penghargaan

1. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Teladan III Fakultas Hukum UNDIP dari Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 1982.
2. Satyalencana Dwidya Siska dari Menhankam, Tahun 1990.
3. Satyalencana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia, Tahun 2000.
4. Piagam Penghargaan 25 Tahun Mengabdikan di Universitas Diponegoro dari Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2001.

H. Pengalaman Penelitian

1. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Jawa Tengah.
2. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Di Jawa Tengah.
3. Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus hukum Pidana Adat Bali) – Disertasi.
4. Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Tentang Ketentuan Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Transfer Dana.
5. Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Tentang Sanksi Dalam Rancangan Undang-Undang Likuidasi Bank.

I. Publikasi Karya Ilmiah

1. Buku
- a. Ruang Lingkup Umum
 1. Tindak Pidana Korupsi, Koneksi dan Nepotisme, ISBN : 979-9156-50-5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Tahun 2000.

2. **Kapita Selekta Hukum Pidana**, ISBN : 979.9156.98.X, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Tahun 2001.
- b. **Ruang Lingkup Terbatas**
1. **Etika Profesi Hukum.**
 2. **Politik Hukum.**
- II. **Karya Ilmiah Lepas/Makalah**
1. **Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0121389, Nomor 2, Tahun 1986.
 2. **Adjudikasi Dan Rule of Law Serta Implementasinya Di Indonesia**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Nomor : 4, Tahun 1988.
 3. **Beberapa Permasalahan Dalam Sistem Pemidanaan Dalam Konsep KUHP Baru**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Nomor : 1, Tahun 1989.
 4. **Masalah Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Utang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Nomor : 6, Tahun 1989.
 5. **Beberapa Alternatif Pidana Pencabutan Kemerdekaan Dalam Konsep KUHP Baru**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Nomor : 1, Tahun 1993.
 6. **Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Perbandingan (KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia)**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Nomor : 8, Tahun 1994.
 7. **Perjokian Dilihat Dari Sudut Politik Kriminal**, PENA UNIKAL, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ISSN 0854-7521, Volume : 05 / Th. III, Tahun 1995.
 8. **Kendala Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Nomor : 3, Tahun 1997.

9. Money Laundering, Hakikat Dan Pencegahannya, PENA UNIKAL, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ISSN 0854-7521, Volume : 05 / Th. V, Tahun 1997.
10. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ISSN 0126-1389, Volume : XXX, Nomor : 4, Oktober - Desember 2001, Tahun 2001.
11. Kebijakan Kriminalisasi Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan pada Seminar Nasional Hukum Pidana Dalam Dunia Perbankan dan Perdagangan Internasional, FH. USU Medan, Tahun 1995.
12. Aspek Hukum (Pidana) Pembuat, Pengedar dan Pengguna Ecstasy dan Obat Terlarang, pada Seminar Nasional Penanggulangan Penyalahgunaan Ecstasy dan Pemakaian Obat Terlarang, Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 1996.
13. "Treatment of Offenders" dalam Konteks Hak Asasi Manusia (Implementasinya Dalam Pembinaan Napi Dewasa dan Anak), Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 1998.
14. Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 1998.
15. Antisipasi Terhadap Kejahatan Dalam Sistem Peradilan, pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 1999.
16. Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan dan Perkebunan, pada Seminar Nasional Kehutanan dan Perkebunan Membangun Pola Hukum Pemberdayaan Hutan dan Kebun Yang Lebih Bertanggung Jawab, Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 2000.
17. Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Pada Rakor Ditserse Polda Jateng, Tahun 2001.
18. Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat pada Seminar Regional di UPS Tegal, Tahun 2000.
19. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, pada Seminar Temu Pakar "RUU Perlindungan Anak" di Balai rung Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Tahun 2000.

20. Analisis Yuridis UU No. 11 Tahun 1963 dan Rencana Perubahannya, pada Diskusi Panel Tingkat Regional Fakultas Hukum UMK Kudus, Tahun
21. Pertanggungjawaban Dalam Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Pidana Pada Dialog Interaktif Hukum Lingkungan di UPS Tegal, Tahun 2001.
22. Perlindungan Hukum Atas Merek-Merek Terkenal Di Indonesia, Pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Hakl Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil Dan menengah, Tahun 2000.
23. Politik Hukum Indonesia pada Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum di Kantor Wilayah Depkeh Jateng, Tahun 2002.
24. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Tindak Pidana Ekonomi, pada Coiloqium Penyusunan Naskah Akademik RUU Perbankan, Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 2002.
25. Konsekuensi Hukum Atas Arogansi Penentu Kebijakan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan, Donohudan, pada Diskusi Interaktif Menyikapi Perjalanan Kasus Donohudan, Tahun 2000.
26. Pembaruan dan Pengembangan (Ilmu) Hukum Pidana, pada Lokakarya Kurikulum Fakultas Hukum UNIKAL, UPS dan UNWIKU, Tegal, Tahun 2002.
27. Hukum Pers dan Pelaksanaan Tugas Kehumasan Daerah, pada Pertemuan Jajaran Kehumasan Kabupaten/Kota se-Jateng, Bandung, Tahun 2002.
28. Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi, pada Dies Natalis dan Wisuda Sarjana Universitas Pekalongan, Tahun 1998.

J. Kegiatan Dalam Seminar/Simposium/Lokakarya

- | | |
|------|--|
| 1995 | Pembicara pada Seminar Nasional Hukum Pidana dalam Dunia Perbankan dan Perdagangan Internasional, Medan. |
| 1996 | Pembicara pada Seminar Nasional Penanggulangan Penyalahgunaan Ecstasy dan Pemakaian Obat Terlarang, FH UMM Magelang. |
| 1999 | Pembicara pada Seminar Nasional Maffa Peradilan FH UNDIP. |
| 2000 | Pembicara pada Seminar Nasional Kehutanan dan Perkebunan Membangun Pola Hukum Pemberdayaan Hutan dan Kebun Yang Lebih Bertanggung Jawab, Fakultas Hukum UNDIP. |

- Pembicara pada Seminar/Temu Pakar RUU Perlindungan Anak, Jakarta.
- Pembicara pada Seminar Regional di UPS Tegal.
- Pembicara pada Diskusi Panel Tingkat Regional Fakultas Hukum UMK Kudus.
- Pembicara pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Hakl Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah.
- Pembicara pada Diskusi Interaktif Menyikapi Perjalanan Kasus Donohudan.
- 2001 Pembicara pada Rakor Ditserse Polda Jateng.
- Pembicara pada Dialog Interaktif Hukum Lingkungan di UPS Tegal.
- 2002 Pembicara pada Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Di Kantor Wilayah DEPKEH Jateng.
- Pembicara pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik RUU Perbankan Fakultas Hukum UNDIP.
- Pembicara pada Lokakarya Kurikulum Fakultas Hukum UNIKAL, UPS dan UNWIKU, di Tegal.
- Pembicara pada Pertemuan Jajaran Kehumasan Kab/Kota se-Jateng di Bandungan.
- 2003 Pembicara dalam "Diskusi Publik Persepsi dan Reaksi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta"
- Pembicara dalam diskusi "Efektivitas Perda Pemberantasan Perjudian di Jateng", diselenggarakan oleh Kelompok Diskusi Wartawan Jawa Tengah.
- 2004 Pembicara dalam "Bedah Buku Putusan Kasasi Akbar Tanjung Tinjauan Yuridis" Kelompok Diskusi Kelas Sosial (KDKS) Fakultas Hukum UNDIP.
- Pembicara dalam "Studium General" yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto.
- Pembicara dalam Talk Show "Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden", di Gedung Pemilu Jawa Tengah.
- Pembicara dalam "Debat Ahli APBD DPRD Jateng" Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT)
- Pembicara dalam "Studium General" yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra, Denpasar Bali

===== 000 =====